

KATA PENGANTAR

Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai arahan bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk masa satu tahun (tahun 2021) dengan berpedoman pada RENSTRA 2021 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Barat 2021-2026.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Disadari bahwa Rencana kerja (Renja) 2021 ini masih jauh dari sempurna maka diharapkan saran dan masukan semua pihak khususnya dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanjung jabung Barat guna lebih meningkatkan kinerja organisasi sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi tugas kedewanan Anggota DPRD yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Oleh karena itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) 2020 ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2021

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

H E N R I Z A L, S.Pt, MM

Pembina Tk. 1

NIP. 19710911 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika	
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020 ..	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD.....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	
3.3 Program dan Kegiatan	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
 BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana tahunan pembangunan yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun. Rencana kerja (Renja) OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi dan program pemerintah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan arahan dan kebijakan operasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, Rencana kerja (Renja) OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja tahunan dapat direalisasikan.

Mengingat arti pentingnya dokumen Rencana kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana kerja (Renja) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana kerja (Renja) 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 40);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana kerja (Renja) 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- a. Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024 yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis 2021-2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh bidang-bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 SISTEMATIKA

Penyajian Dokumen Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD 2020
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 28.677.132.699,-** (Dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat tahun 2020, dan mengalami perubahan (pengurangan) sehingga menjadi sebesar **Rp.25.773.249.955,-** (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima *rupiah*), berdasarkan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Tanjab Barat tahun 2020.

Alokasi anggaran dimaksud di atas terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 3.811.343.900,-** (Tiga milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) sampai dengan 31 Desember 2020. Jumlah yang terealisasi sebanyak **Rp. 3.669.190.195,-** (Tiga milyar enam ratus enam puluh Sembilan seratus Sembilan puluh ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) atau terealisasi sebesar **96,27 %**.

2. Belanja langsung sebesar **Rp. 25.773.249.955,-** (Dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan jumlah yang terealisasi sebanyak **Rp. 21.861.366.976,-** (Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembla ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar **84,82 %**.

Rincian Program / kegiatan, alokasi dan penyerapan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dapat dilihat pada rincian berikut ini:

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Anggaran Program	: Rp. 4.968.139.455,-
Realisasi Program	: Rp. 4.112.120.312,-
Persentase Realisasi Keuangan	: 82,77 %
1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Anggaran	: Rp. 13.515.000,-
Realisasi	: Rp. 13.251.000,-
Persentase Realisasi	: 98,05 %
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	
Anggaran	: Rp. 13.515.000,-
Realisasi	: Rp. 13.251.000,-
Prosentase Realisasi	: 86,23 %
3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
Anggaran	: Rp. 1.668.360.000,-
Realisasi	: Rp. 1.269.420.350,-
Prosentase Realisasi	: 76,09 %

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran : Rp. 518.814.413,-
Realisasi : Rp. 492.312.000,-
Prosentase Realisasi : 94,89 %
5. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran : Rp. 160.808.059,-
Realisasi : Rp. 157.924.000,-
Prosentase Realisasi : 98,21 %
6. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran : Rp. 192.400.000,-
Realisasi : Rp. 189.009.975,-
Prosentase Realisasi : 98,24 %
7. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan Kantor
Anggaran : Rp. 78.894.983,-
Realisasi : Rp. 70.609.000,-
Prosentase Realisasi : 89,50 %
8. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Anggaran : Rp. 937.872.000,-
Realisasi : Rp. 731.870.000,-
Prosentase Realisasi : 78,04 %
9. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran : Rp. 776.625.000,-
Realisasi : Rp. 624.495.664,-
Prosentase Realisasi : 80,41 %

10. Kegiatan	: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Anggaran	: Rp. 205.000.000,-
Realisasi	: Rp. 204.631.512,-
Prosentase Realisasi	: 99,82 %

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Anggaran Program	: Rp. 2.903.646.800,-
Realisasi Program	: Rp. 2.786.556.974,-
Prosentase Realisasi Keuangan	: 95,97 %

1. Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Anggaran	: Rp. 80.000.000,-
Realisasi	: Rp. 65.600.000,-
Prosentase Realisasi	: 82,00%
2. Kegiatan	: Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Anggaran	: Rp. 54.000.000,-
Realisasi	: Rp. 52.461.996,-
Prosentase Realisasi	: 97,15 %
3. Kegiatan	: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Anggaran	: Rp. 475. 466.800,-
Realisasi	: Rp. 470.875.000,-
Prosentase Realisasi	: 99,03 %
4. Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin/berkala rumah Jabatan
Anggaran	: Rp. 130.000.000,-
Realisasi	: Rp. 129.720.500,-
Prosentase Realisasi	: 99,79 %

5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 Anggaran : Rp. 1.053.940.000,-
 Realisasi : Rp. 1.047.793.000,-
 Prosentase Realisasi : 99,42 %
6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/
 operasional
 Anggaran : Rp. 678.240.000,-
 Realisasi : Rp. 613.549.575,-
 Prosentase Realisasi : 90,46 %
7. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
 kantor
 Anggaran : Rp. 432.000.000,-
 Realisasi : Rp. 406. 556.903,-
 Prosentase Realisasi : 94, 11 %

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Anggaran Program : Rp. 530.120.200,-
 Realisasi Program : Rp. 413. 215.000,-
 Prosentase Realisasi : 77,95 %

1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta
 Perlengkapannya
 Anggaran : Rp. 530.120.200,-
 Realisasi : Rp. 413. 215.000,-
 Prosentase Realisasi : 77,95 %

- IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
- | | |
|----------------------|--------------------|
| Anggaran Program | : Rp. 66.000.000,- |
| Realisasi Program | : Rp. 45.355.715,- |
| Prosentase Realisasi | : 68,72 % |
1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
- | | |
|----------------------|--------------------|
| Anggaran | : Rp. 66.000.000,- |
| Realisasi | : Rp. 45.355.715,- |
| Prosentase Realisasi | : 68,72 % |
- V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
- | | |
|----------------------|--------------------|
| Anggaran Program | : Rp. 66.500.000,- |
| Realisasi Program | : Rp. 66.338.875,- |
| Prosentase Realisasi | : 99,76 % |
1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- | | |
|----------------------|--------------------|
| Anggaran | : Rp. 66.500.000,- |
| Realisasi | : Rp. 66.338.875,- |
| Prosentase Realisasi | : 99,76 % |
- VI. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Anggaran Program | : Rp. 127.028.000,- |
| Realisasi Program | : Rp. 124.334.500,- |
| Prosentase Realisasi | : 97,88 % |

1. Kegiatan	: Data dan Dokumentasi
Anggaran	: Rp. 201.910.000,-
Realisasi	: Rp. 162.374.000,-
Prosentase Realisasi	: 80,42 %

VII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Anggaran Program	: Rp 16.999.815.500,-
Realisasi Program	: Rp. 14.227.723.600,-
Prosentase Realisasi	: 83,69 %

1. Kegiatan	: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran	: Rp. 2.925.950.000,-
Realisasi	: Rp. 2.291.253.566,-
Prosentase Realisasi	: 78,31 %
2. Kegiatan	: Kegiatan Reses
Anggaran	: Rp. 1.300.000.000,-
Realisasi	: Rp. 1.226.248.221,-
Prosentase Realisasi	: 94,33 %
3. Kegiatan	: Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah dan Luar Daerah
Anggaran	: Rp. 11.687.079.000,-
Realisasi	: Rp. 9.894.456.813,-
Prosentase Realisasi	: 84,66 %
4.. Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
Anggaran	: Rp. 179.571.000,-
Realisasi	: Rp. 31.571.000,-

Prosentase Realisasi	: 17,58 %
5. Kegiatan	: Penyusunan Buku Risalah
Anggaran	: Rp. 95.250.000,-
Realisasi	: Rp. 81.000.000,-
Prosentase Realisasi	: 85,04 %
6. Kegiatan	: Sosialisasi Hearing Pra Raperda Inisiatif
Anggaran	: Rp. 158.293.000,-
Realisasi	: Rp. 77.526.500,-
Prosentase Realisasi	: 48,98 %
7. Kegiatan	: Rapat-rapat DPRD
Anggaran	: Rp. 653.672.500,-
Realisasi	: Rp. 625. 667.500,-
Prosentase Realisasi	: 48,98 %

VIII. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Anggaran Program	: Rp. 112.000.000,-
Realisasi Program	: Rp. 85.722.000,-
Prosentase Realisasi	: 76,54 %
1.. Kegiatan	: Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Anggaran	: Rp. 112.000.000,-
Realisasi	: Rp. 85.722.000,-
Prosentase Realisasi	: 76,54 %

Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua Program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 telah tinggi yaitu sebesar 86,30 %. Pengukuran Kinerja Kegiatan diatas menunjukkan bahwa sasaran yang diinginkan hingga 31 Desember 2020 telah memenuhi target.

Berikut ini kami sajikan tabel tentang perkiraan pencapaian Rencana Strategis s/d tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
	SEKRETARIAT DPRD						
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	98,05	100	98,05	98,05
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	100%	86,23	100	86,23	86,23
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	76,09	100	76,09	76,09
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	94,89	100	94,89	94,89
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	98,21	100	98,21	98,21
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	98,24	100	98,24	98,24
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	89,50	100	89,50	89,50
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	78,04	100	78,04	78,04

	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	80,41	100	80,41	80,41
	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	99,82	100	99,82	99,82
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	95,97	100	95,97	95,97
	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	100%	0	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	82	100	82	82
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100%	99,03	100	99,03	99,03
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan	100%	97,15	100	97,15	97,15
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100%	99,42	100	99,42	99,42
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlahpemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	90,46	100	90,46	90,46
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	94,11	100	94,11	94,11
	Rehabilitasi sedang /berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	100%	0	0	0	0
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor	100%	0	0	0	0
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan Rumah Jabatan/Dinas	100%	97,15	0	97,15	97,15
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin Aparatur	100%	77,95	100	77,95	77,95
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	77,95	100	77,95	77,95

4	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	% ASN sesuai Kompetensi	80%	68,72	100	68,72	68,72
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparaturnya peserta diklat/bintek	100%	68,72	100	68,72	68,72
	Pendidikan dan pelatihan non formal Pengamanan Dalam	Jumlah personil PAMDAL peserta Pendidikan dan pelatihan	100%	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIB B	100%	99,76	100	99,76	99,76
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Renstra. Renja, LPPK,, PK, LKA	5 Dokumen	99,76	24	99,76	99,76
6	Program Peningkatan kapasitas lembaga peradilan rakyat	Jumlah penetapan rancangan perda	85 Perda	83,69	20	83,69	83,69
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	20	78,31	20	78,31	78,31
	Rapat rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah fasilitasi rapat AKD	100	90	100	90	90
	Rapat rapat paripurna	Jumlah Fasilitasi Rapat rapat paripurna	100	90	100	90	90
	Kegiatan Reses	Frekuensi reses yang dilaksanakan	15 kali	3	3	94,33	94,33
	Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dalam dan luar daerah	jumlah kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD ke dalam dan luar daerah	100	84,66	100	84,66	84,66
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek/Diklat/Seminar	100	17,58	100	17,58	17,58

	Penyusunan Buku Risalah	Jumlah dokumen risalah rapat rapat	100	85,04	100	85,04	85,04
	Sosialisasi Hearing Pra Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah peserta sosialisasi hearing	9 Raperda	48,98	0	48,98	48,98
	Rapat-Rapat DPRD	Jumlah rapat rapat dprd	Kali	-	-	95,72	95,72
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya penyebaran informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100	97,88	100	97,88	97,88
	Data dan Dokumentasi	Jumlah data dan dokumentasi	100	97,88	100	97,88	97,88
8	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya keselarasan perda terhadap peraturan perundangan di atasnya	100%	76,54	100	76,54	76,54
	Legislasi rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah fasilitasi kegiatan Bapemperda, Pansus LKPJ, dan LKPD	85 Perda	0	0	0	0
	Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan.	100%	0	0	0	0
	Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah dokumen data dan informasi produk hokum	100%	97,88	0	97,88	97,88

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan penyelenggaraan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai perencanaan dan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan serta tugas-tugas dan fungsi DPRD lainnya.

b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD.

c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD yang terdiri dari Rapat-rapat komisi, Rapat Bamus, Rapat Banggar, Rapat Bapemperda, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus, Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna, Hearing.

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah, maka dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada sekretariat DPRD yang antara lain misalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat dan bimbingan teknis/kursus-kursus singkat
2. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan yang mencukupi
3. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
5. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan legal drafting Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, dan Keputusan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka review Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 Sekretariat DPRD sudah tercermin dalam Visi dan Misi

Sekretariat DPRD, dengan demikian diharapkan bahan Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah dibuat untuk tahun 2021 dapat direalisasikan sesuai dengan pedoman kerja yang sudah ada.

Rencana kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun pada Sekretariat DPRD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Sekretariat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

KODE	Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD						Hasil Analisis Kebutuhan 2021 (permendagri 90 tahun 2019 – kepmendagri 050- 3708 : pemutakhiran)						
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Kode	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan dana	Catatan penting	
-1-		-3-	-4-	-5-	-6-		-7-	-8-	-9-	-10-	-11-		
						01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						
						2.02	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tanjung Barat			66,850,000,-		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD			06	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanjung Barat	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	260 buku	66,850,000,-		
						2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tanjung Barat	Berjalannya pelayanan administrasi Keuangan dengan lancar	12 bulan	4,320,771,530,-		
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanjung Barat		12 bulan	3,541,791,530,-		
						02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tanjung Barat		12 bulan	778,980,000,-		
						2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tanjung Barat	Berjalannya kegiatan administrasi kepegawaian dengan baik	12 bulan	704,862,500,-		

							02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tanjab Barat	Tersedianya pakaian Dinas yang baik	12 bulan	580,004,500,-	
							09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab Tanjab Barat	Tercapainya Pegawai yang terlatih	12 bulan	124,858,000,-	
01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya pelayanan administrasi pekantoran dengan lancar (rata-rata bulan)	12 bulan		2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tanjab Barat	Berjalannya pelayanan administrasi Umum dengan lancar	12 bulan	1,205,786,559,-	
							01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	105,299,491,-	
							02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	45,828,535,-	
							04	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	153,568,533,-	
							05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab Tanjab Barat	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	188,502,000,-	
							06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tanjab Barat	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	12 bulan	444,000,000,-	
							09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Tanjab Barat	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	168,588,000,-	
						2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tanjab Barat	Tersedianya barang milik daerah yang memadai	12 bulan	28,225,000,-	

							06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab Tanjab Barat	Tersedianya peralatan dan mesin yang memadai	12 bulan	186,426,400,-	
						2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanjab Barat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	1,246,355,161,-	
01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab Tanjab Barat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan			01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab Tanjab Barat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 bulan	12,150,000,-	
02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kab Tanjab Barat	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan			02	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kab Tanjab Barat	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	440,032,000	
							04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya jasa pelayanan dengan baik	12 bulan	794,173,161,-	
						2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanjab Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	2,033,326,400,-	
							01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanjab Barat	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan	12 bulan	576,850,000,-	
							06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanjab Barat	Terpeliharanya mesin dan peralatan lainnya	12 bulan	382,676,400,-	

							09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Tanjab Barat	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	1,073,800,000,-	
						2.15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab Tanjab Barat	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 bulan	19,486,468,200,-	
07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Kab Tanjab Barat	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan			01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Tanjab Barat	Terlaksananya administrasi keuangan DPRD	12 bulan	19,486,468,200,-	
						2.16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Kab Tanjab Barat	Terpenuhinya pelayanan administrasi DPRD	12 bulan	1,353,869,143,-	
							02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab Tanjab Barat	Terfasilitasinya kegiatan fraksi DPRD	12 bulan	442,215,000,-	
	Rapat Rapat DPRD	Kab Tanjab Barat	Jumlah rapat rapat DPRD	119 Kali			03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Tanjab Barat	Jumlah rapat rapat DPRD	288 kali rapat	616,249,750,-	
	Pengadaan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kab Tanjab Barat	Jumlah Pengadaan Rumah Tangga Pimpinan	1 Paket			04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Tanjab Barat	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	12 bln	295,404,393,-	
							02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kab Tanjab Barat			16,740,749,598,-	
							2.01	Kegiatan Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD	Kab Tanjab Barat	Terselenggaranya pembentukan Perda dan peraturan DPRD		3,980,911,166,-	

	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab. Tanjab Barat	Jumlah raperda yang dibahas	10 Raperda		01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah raperda yang dibahas	288 kali rapat	696,375,000,-	
							02	Pembahasan Rancangan PERDA	Kab. Tanjab Barat	Jumlah raperda yang dibahas	288 kali rapat	2,785,052,000,-	
							03	Penyelenggaraan Kajian PerUndang-undangan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan yang dibahas	288 kali rapat	221,395,166,-	
							04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen dan Laporan Rapat	288 kali rapat	278,125,000,-	
15	09	Rapat-rapat Pembahasan APBD, APBDP, KUA dan PPAS,LKPJ, LKPD dan RANPERDA	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan		2.02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				1,276,155,000,-	
							01	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	9,720,000,-	
							02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	9,720,000,-	
							03	Pembahasan APBD	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	447,920,000,-	

							04	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	255,420,000,-	
							06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	553,375,000,-	
26	16	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat-rapat DPRD									
						2.04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				1,368,146,932,-	
	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek/diklat/seminar	35 org		02	Bimbingan Teknis DPRD	Luar Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek/diklat/seminar		700,000,000,-	
23	10	Data Dan Dokumentasi	Kab Tanjab Barat	Jumlah Data dan Dokumentasi			03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Data dan Dokumentasi		668,146,932,-	
						2.05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1,510,003,500,-	
	05	Kegiatan Reses	Kecamatan	Frekuensi reses yang dilaksanakan	Laporan		03	Pelaksanaan Reses	Kecamatan	Frekuensi reses yang dilaksanakan	Laporan	1,510,003,500,-	
						2.08		Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				8,605,533,000,-	
	06	Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota	Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan/Anggota	12 bulan		01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan/Anggota DPRD kedalam dan	12 bulan	8,605,533,000,-	

RENJA 2021

		DPRD dalam dan luar daerah		gotas DPRD kedalam dan luar daerah						luar daerah			
				Jumlah						Jumlah		47,345,465,491,-	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi selaku pemberi pelayanan terhadap tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD, Sekretariat DPRD hanya sebatas memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk melakukan pertemuan/hearing bersama dengan masyarakat kepada bidang/komisi yang menangani tentang permasalahan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, maka Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat kami sajikan/sampaikan.

Tabel : 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar Penyelenggaran Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kab. Tanjab Barat pada tahun 2021 ini tidak terkait langsung dengan kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang (tahun 2022) . Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran dan pelayanan administrasi keuangan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas yang memiliki kompeten dalam melaksanakan pelayanan kepada DPRD
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Meningkatkan Disiplin Aparatur

5. Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan penyusunan legislasi daerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD
6. Mendorong peningkatan kapasitas lembaga, pimpinan dan anggota DPRD.

Sesuai Dengan tujuan Renja yang dikemukakan diatas, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya tata kelola kesekretariatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang memenuhi standar kompetensi.
3. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara proporsional.
4. Terwujudnya peningkatan kemampuan fasilitasi dan pelayanan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Administrasi keuangan, dan rapat-rapat yang dilaksanakan DPRD serta penyediaan bahan pembuatan produk hukum daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Fraksi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi penyusunan Penjelasan / Keterangan dan atau Naskah Akademik

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- Bimbingan Teknis DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan

4. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Pelaksanaan Reses

5. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Hasil Analisis Kebutuhan 2021 (permendagri 90 tahun 2019 kepermendagri 050- 3708 : pemutakhiran)					
Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Kebutuhan dana	Catatan penting
-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA		Terlaksananya Program Urusan Pemerintah Kabupaten		30,604,715,893,-	
Kegiatan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66,850,000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Tanjab Barat	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	260 buku	66,850,000,-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tanjab Barat	Berjalannya pelayanan administrasi Keuangan dengan lancar	12 bulan	4,320,771,530,-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tanjab Barat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3,541,791,530,-	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Tanjab Barat	Terselenggaranya administrasi ASN	12 bulan	778,980,000,-	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Tanjab Barat	Berjalannya kegiatan administrasi kepegawaian dengan baik	12 bulan	704,862,500	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Tanjab Barat	Tersedianya pakaian Dinas yang baik	418 stell	580,004,500,-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab Tanjab Barat	Tercapainya Pegawai yang terlatih	12 bulan	124,858,000,-	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tanjab Barat	Berjalannya pelayanan administrasi Umum dengan lancer	12 bulan	1,205,786,559,-	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	105,299,491,-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	45,828,535,-	
Penyediaan bahan logistik kantor	Kab Tanjab Barat	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	153,568,533,-	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab Tanjab Barat	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	188,502,000,-	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tanjab Barat	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan	12 bulan	444,000,000,-	

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Tanjung Barat	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	168,588,000,-	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tanjung Barat	Tersedianya barang milik daerah yang memadai	12 bulan	186,426,400,-	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab Tanjung Barat	Tersedianya peralatan dan mesin yang memadai	12 bulan	186,426,400,-	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanjung Barat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	1,246,355,161,-	
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab Tanjung Barat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 bulan	12,150,000,-	
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kab Tanjung Barat	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	440,032,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tanjung Barat	Tersedianya jasa pelayanan dengan baik	12 bulan	794,173,161,-	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tanjung Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	2,033,326,400,-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tanjung Barat	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan	12 bulan	576,850,000,-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tanjung Barat	Terpeliharanya mesin dan peralatan lainnya	12 bulan	382,676,400,-	
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab Tanjung Barat	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	1,073,800,000,-	
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab Tanjung Barat	Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 bulan	19,486,468,200,-	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Tanjung Barat	Terlaksananya administrasi keuangan DPRD	12 bulan	19,486,468,200,-	
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Kab Tanjung Barat	Terpenuhinya pelayanan administrasi DPRD	12 bulan	1,353,869, 143,-	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab Tanjung Barat	Terfasilitasinya kegiatan fraksi DPRD	12 bulan	442,215,000,-	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Tanjung Barat	Jumlah rapat rapat DPRD	288 kali rapat	616,249,750,-	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Tanjung Barat	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	12 bln	295,404,393,-	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		16,740,749,598,-	

Kegiatan Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD		Terselenggaranya kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD		3,980,911,166,-	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Kab. Tanjab Barat	Jumlah raperda yang dibahas	288 kali rapat	696,375,000,-	
Pembahasan Rancangan PERDA	Kab. Tanjab Barat	Jumlah raperda yang dibahas	288 kali rapat	2,785,052,000,-	
Penyelenggaraan Kajian PerUndang-undangan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan yang dibahas	288 kali rapat	221,395,166,-	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen dan Laporan Rapat	288 kali rapat	278,125,000,-	
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Tanjab Barat			1,276,155,000,-	
Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Tanjab Barat	Kab. Tanjab Barat	Terselenggaranya kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	9,720,000,-	
Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	9,720,000,-	
Pembahasan APBD	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	447,920,000,-	
Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	255,420,000,-	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat – Rapat Pembahasan	288 kali rapat	553,375,000,-	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Kapasitas DPRD		1,368,146,932,-	
Bimbingan Teknis DPRD	Luar Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek/diklat/seminar		700,000,000,-	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Tanjab Barat	Jumlah Data dan Dokumentasi	12 bln	668,146,932,-	
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Tanjab Barat			1,510,003,500,-	
Pelaksanaan Reses Terserapnya aspirasi masyarakat dalam Kecamatan	Kecamatan	Frekuensi reses yang dilaksanakan	Laporan	1,510,003,500,-	

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Terfasilitasi tugas DPRD		8,605,533,000,-	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Luar Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan/Anggota DPRD kedalam dan luar daerah	12 bulan	8,605,533,000,-	
		Jumlah		47,345,465,491,-	

BAB V

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat dilaksanakan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Sekretariat DPRD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja ini merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam melayani dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan acuan awal dalam penyusunan APBD Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021. Terima Kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H E N R I Z A L, S.Pt, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710911 199803 1 004